



PUTUSAN

NOMOR 11/Pdt.G/2017/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Kananga binti Painga', umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Buttadidia, Desa Kale Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**.

melawan

Sangkala Dg. Talli bin Nunggu, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Buttadidia, Desa Kale Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pihak pemohon dan termohon.

Telah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register Nomor 11/Pdt.G/2017/PA Tkl., tanggal 10 Januari 2017 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1960, pemohon dengan suami pemohon bernama Nunggu bin Nyongko melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua pemohon di Desa Kale Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 11/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon bernama Painga' dan saksi nikahnya masing-masing bernama :

- a. Itappi Dg. Ngerang.
- b. Tawalla Dg. Tata.

Mas kawinnya berupa satu Pohon Langsung dibayar tunai.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus perawan dan suami pemohon berstatus jejaka.

4. Bahwa, antara pemohon dan suami pemohon punya hubungan keluarga sebagai sepupu dua kali, tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut pemohon dengan suami pemohon bertempat tinggal di Dusun Buttadidia, Desa Kale Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:

1. Bacce Dg Bunga binti Nunggu.
2. Sangkala Dg. Talli bin Nunggu.
3. Jamaluddin Dg. Ngago bin Nunggu.
4. Sineni Dg. Bollo binti Nunggu.
5. Syamsiati Dg. Romba binti Nunggu.

6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon dengan suami pemohon tersebut dan selama itu pula pemohon dengan suami pemohon tetap beragama Islam.

7. Bahwa suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2017 karena Sakit dan semasa hidupnya suami pemohon adalah Pensiunan Veteran.

8. Bahwa, pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Dusun Buttadidia, Desa Kale Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara dan setelah pemohon mengurusnya ternyata pernikahan pemohon dengan suami pemohon Nunggu bin Nyongko tersebut tidak tercatat karena pencacatan pernikahan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 belum tertib.

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 11/Pdt.G/2017/PA Tkl.



9. Bahwa oleh karena itu pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar untuk mengurus uang duka dan peralihan pensiun menjadi pensiun janda pemohon dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon (Kananga binti Painga') dengan seorang laki-laki bernama Nunggu bin Nyongko yang dilaksanakan pada tahun 1960 di Desa Kale Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon dan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan atas panggilan tersebut pemohon dan termohon telah hadir secara *in person* di persidangan, kemudian Majelis telah memberikan pandangan kepada pemohon tentang prosedur pengesahan nikah, lalu pemohon menyatakan faham dan mengerti, kemudian menyatakan tetap dengan permohonannya untuk mendapatkan itsbat nikah di Pengadilan Agama Takalar.

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan pemohon tertanggal 9 Januari 2017 yang isinya tetap dipertahankan pemohon, selain itu pemohon juga menjelaskan bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kelengkapan administrasi pengurusan uang duka atas nama Nunggu bin Nyongko dan pengalihan pensiun janda kepada pemohon dan

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 11/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain-lain yang menjadi hak pemohon pada Kantor PT Taspen Cabang Makassar.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kananga, Nomor 7305044107450332, tanggal 26 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.1.
- 2) Fotokopi Surat Keterangan Penyaksian Pernah Nikah atas nama Nunggu, Nomor 07/OK/IX/1994, tanggal 1 September 1994, dikeluarkan oleh Imam PPN Desa/Kelurahan Ko'mara Kabupaten Takalar, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.2.
- 3) Fotokopi Petikan Surat Keputusan tentang Pengakuan Pengesahan dan Penganugrahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia atas nama Nunggu, Nomor Skep/340/III/1992, tanggal 17 Maret 1992, yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu diberi kode P.3.
- 4) Fotokopi Kartu Identitas Pensiun, Nomor 97422/1001032200, tanggal 26 September 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Taspen Cabang Makassar, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.4.
- 5) Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 61/DKK/XII/2016, tanggal 9 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar, Kepala Desa Kale Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.5.

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 11/Pdt.G/2017/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Fotokopi Petikan Surat Keputusan tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985, Nomor 11/03/36/A-XVIII/I/1997, atas nama Nunggu, tanggal 8 Januari 1997, dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Keamanan RI, Direktorat Jenderal Personil Tenaga Manusia dan Veteran, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.6.
- b. Saksi-saksi di bawah sumpah :
1. Tawalla bin Painga, umur 60 tahun, agama Islam, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal pemohon dan suami pemohon bernama Nunggu bin Nyongko karena saksi adalah adik kandung pemohon.
 - Bahwa saksi mengenal termohon adalah anak kandung pemohon dan suami pemohon.
 - Bahwa pemohon dan suami pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 1960 di Dusun Buttadidia, Desa Kale Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
 - Bahwa pemohon dan suami pemohon beragama Islam.
 - Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan pemohon dengan suami pemohon.
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung yang bernama Painga'.
 - Bahwa saksi nikahnya bernama Itappi Dg. Ngerang dan Dg. Tolawa, dan maharnya berupa 1 (satu) pohon Langsung dibayar tunai.
 - Bahwa sewaktu menikah, status pemohon adalah perawan sedangkan suami pemohon berstatus jejaka.
 - Bahwa pemohon dan suami pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak.
 - Bahwa antara pemohon dengan suami pemohon tidak ada halangan untuk menikah secara agama baik itu hubungan sedarah ataupun sesusuan dan tidak pula semenda.

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 11/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada pula pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut dan tidak pula pernah bercerai atau berpoligami.
 - Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2016 karena sakit.
 - Bahwa semasa hidupnya, suami pemohon adalah pensiunan veteran.
 - Bahwa maksud pemohon mengurus pengesahan nikah ini adalah untuk kelengkapan administrasi pada Kantor PT. Taspen dan mengurus uang duka serta pengalihan pensiun janda kepada pemohon.
2. Singara binti Painga', umur 69 tahun, agama Islam, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal suami pemohon bernama Nunggu bin Nyongko karena saksi adalah adik kandung pemohon.
 - Bahwa saksi mengenal termohon adalah anak kandung pemohon dan suami pemohon.
 - Bahwa pemohon dan suami pemohon adalah suami istri yang telah menikah di Dusun Buttadidia, Desa Kale Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar pada tahun 1960.
 - Bahwa pemohon dan suami pemohon beragama Islam.
 - Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan pemohon dengan suami pemohon.
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung yang bernama Painga'.
 - Bahwa saksi nikahnya bernama Itappi Dg. Ngerang dan Dg. Tolawa, dan maharnya berupa 1 (satu) pohon Langsung dibayar tunai.
 - Bahwa sewaktu menikah, status pemohon adalah perawan sedangkan suami pemohon berstatus jejaka.
 - Bahwa pemohon dan suami pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Bacce Dg Bunga binti Nunggu, Sangkala Dg. Talli bin

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 11/Pdt.G/2017/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunggu, Jamaluddin Dg. Ngago bin Nunggu, Sineni Dg. Bollo binti Nunggu dan Syamsiati Dg. Romba binti Nunggu.

- Bahwa antara pemohon dengan suami pemohon tidak ada halangan untuk menikah secara agama baik itu hubungan sedarah ataupun sesusuan dan atas pernikahan tersebut pemohon dan suaminya pernah bercerai.
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2016 karena sakit.
- Bahwa maksud pemohon mengurus pengesahan nikah ini adalah untuk kelengkapan administrasi dan mengurus uang duka serta pengalihan pensiun janda dan lain-lain pada Kantor PT. Taspen.

Bahwa selanjutnya pemohon dan termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, selain memohon putusan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Takalar sebagaimana bukti (P.1), maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 142 R.Bg., maka Pengadilan Agama Takalar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa pemohon dan suami pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tahun 1960 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, akan tetapi tidak memiliki akta nikah, sedangkan pemohon saat ini sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 11/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kelengkapan administrasi pada Kantor PT. Taspen dan mengurus uang duka serta pengalihan pensiun janda.

Menimbang, bahwa menurut hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan dimaksud.

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai suami isteri, pemohon mengaku bahwa pemohon dan suami pemohon yang bernama Nunggu bin Nyongko telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada tahun 1960 di Dusun Buttadidia, Desa Kale Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dengan wali nikah Ayah kandung bernama Painga', disaksikan oleh saksi nikah Itappi Dg. Ngerang dan Dg. Tolawa disertai dengan mahar 1 (satu) pohon Langsung dibayar tunai.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran identitas pemohon, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) (P.1), merupakan bukti autentik mengenai identitas pemohon yang telah bermaterai dan dinazegelen pos.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2016, pemohon telah mengajukan bukti P.5 yang telah bermaterai dan dinazegelen pos.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa suami pemohon adalah Veteran RI, pemohon telah mengajukan bukti surat P.3, P.4, P.6 telah bermaterai dan dinazegelen pos.

Menimbang, bahwa bukti seluruh bukti surat tersebut majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg dan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, pemohon juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, dan terhadap dua orang saksi yang

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 11/Pdt.G/2017/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan pemohon di persidangan Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan secara materil keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian satu sama lain, dan relevan serta mendukung dalil-dalil permohonan pemohon, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, Pasal 175 R.Bg, Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, berdasarkan hal tersebut majelis menilai kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap bukti-bukti tersebut di atas majelis menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa benar pemohon yang beragama Islam telah menikah secara agama Islam, dengan seorang laki-laki beragama Islam bernama Nunggu bin Nyongko pada tahun 1960 di Dusun Buttadidia, Desa Kale Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dengan wali nikah Ayah kandung sendiri bernama Painga', dihadiri oleh saksi-saksi bernama Itappi Dg. Ngerang dan Dg. Tolawa, dengan mahar berupa 1 (satu) pohon Langsung dibayar tunai, sedangkan antara pemohon dan suami tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan secara hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya, sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dan suami pemohon memeluk agama Islam, maka perkawinan pemohon harus dilakukan sesuai ketentuan agama Islam, dimana menurut ketentuan agama Islam rukun dan syarat perkawinan adalah harus ada calon suami, calon isteri, wali, mahar, 2 (dua) orang saksi, dan akad (ijab dan kabul) sebagaimana disebutkan dalam fiqh Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ternyata perkawinan pemohon dan suaminya telah dilaksanakan sesuai ketentuan

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 11/Pdt.G/2017/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam, dan antara pemohon dan suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menyatakan “perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama” dan itsbat nikah dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, antara lain huruf (d): adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti perkawinan yang dilakukan pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam Indonesia, oleh karenanya majelis menilai perkawinan pemohon dapat disahkan, dan permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan antara pemohon dengan suami pemohon (Nunggu bin Nyongko).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon (Kananga binti Painga') dengan seorang laki-laki bernama Nunggu bin Nyongko yang dilaksanakan pada tahun 1960 di Dusun Buttadidia, Desa Kale Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 11/Pdt.G/2017/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Kartini Suang sebagai Ketua Majelis dan Musafirah, S.Ag., M.HI, serta Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Hj. Hasniah, S.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Musafirah, S.Ag., M.HI

Dra. Kartini Suang

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Hj. Hasniah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 11/Pdt.G/2017/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp 220.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 11/Pdt.G/2017/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)